Diktat Peradilan Agama di Indonesia

**Mochammad Agus Rachmatulloh
Moch Choirul Rizal**

**Kata Sambutan:
Dr. Khamim, M.Ag.
(Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri)**

**Diktat
Peradilan Agama di Indonesia**

**Oleh:
Mochammad Agus Rachmatulloh
Moch Choirul Rizal**

**Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
2021**

Diklat
Peradilan Agama di Indonesia

Penyusun
Mochammad Agus Rachmatulloh
Moch Choirul Rizal

Penyunting
Mochammad Agus Rachmatulloh

Penata Letak dan Desain Sampul
Moch Choirul Rizal

(Gambar pada sampul diunduh dari <https://pa-ruteng.go.id/> dan diolah seperlunya)

**Terbit pertama kali dalam bahasa Indonesia,
di Kediri, Maret 2021,
vii + 53 halaman, 15 x 23 cm.**

Diterbitkan oleh:
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan, sehingga kami dapat menyusun “Diktat Peradilan Agama di Indonesia” yang sederhana ini. Salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Diktat ini kami maksudkan untuk menambah referensi bagi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang mengambil mata kuliah “Peradilan Agama di Indonesia”. Penyusunan diktat ini kami selaraskan dengan rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah yang dimaksud.

Diktat ini kami susun berdasarkan pada berbagai referensi terkait eksistensi peradilan agama di Indonesia. Untuk mempermudah pembacaan, diktat ini tersusun atas 10 (sepuluh) bab: (1) Bab I: Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; (2) Bab II: Pelaku Kekuasaan di Indonesia; (3) Bab III: Sejarah Peradilan Agama pada Masa Penjajahan di Indonesia; (4) Bab IV: Perkembangan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia; (5) Bab V: Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia; (6) Bab VI: Susunan Badan Peradilan Agama di Indonesia; (7) Bab VII: Susunan Badan Peradilan Tinggi Agama di Indonesia; (8) Bab VIII: Kekuasaan Badan Peradilan Agama di Indonesia; (9) Bab IX: Pengawasan Internal terhadap Peradilan Agama di Indonesia; dan (10) Bab X: Pengawasan Eksternal terhadap Peradilan Agama di Indonesia.

Atas terbitnya diktat ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri serta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan mengampu mata kuliah “Peradilan Agama di Indonesia”. Di samping itu, ucapakan terima kasih kami juga

kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam penyusunan diktat ini.

Kami menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan buku diktat ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan kesempurnaan karya-karya kami berikutnya.

Kediri, Maret 2021

Mochammad Agus Rachmatulloh
Moch Choirul Rizal

KATA SAMBUTAN

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT dengan harapan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas sehari-hari. Salawat dan salam selalu kita latunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah membaca isi dari diktat ini: mulai dari asas penyelenggaraan dan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, dilanjutkan dengan sejarah, kedudukan, susunan, kekuasaan, sampai terakhir membahas pengawasan pada peradilan agama di Indonesia, kami pandang telah dapat menggambarkan secara utuh mata kuliah “Peradilan Agama di Indonesia”. Oleh karena itu, semoga diktat ini dapat membantu dan bermanfaat, khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Kami mewakili Fakultas Syariah IAIN Kediri mengucapkan terima kasih kepada para dosen pengampu mata kuliah “Peradilan Agama di Indonesia” yang telah menyusun diktat ini. Besar harapan kami agar budaya dalam menyusun bahan ajar seperti ini dapat selalu dilakukan dan dikembangkan pada setiap mata kuliah yang diajarkan di semua program studi pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Hal ini karena, selain juga bermanfaat bagi dosen penyusun, juga berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Fakultas Syariah IAIN Kediri pada masa mendatang.

Kediri, Maret 2021

Dr. Khamim, M.Ag.
(Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri)

DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Katalog	ii
Kata Pengantar	iii
Kata Sambutan.....	v
Daftar Isi.....	vii
Bab I : Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	1
Bab II : Pelaku Kekuasaan di Indonesia	7
Bab III : Sejarah Peradilan Agama pada Masa Penjajahan di Indonesia	9
Bab IV : Perkembangan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia	11
Bab V : Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia	15
Bab VI : Susunan Badan Peradilan Agama di Indonesia	19
Bab VII : Susunan Badan Peradilan Tinggi Agama di Indonesia.....	27
Bab VIII : Kekuasaan Badan Peradilan Agama di Indonesia	33
Bab IX : Pengawasan Internal terhadap Peradilan Agama di Indonesia	37
Bab X : Pengawasan Eksternal terhadap Peradilan Agama di Indonesia	41
Daftar Pustaka.....	49
Tentang Penyusun.....	53

BAB I

ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

1.1. Pengertian Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Asas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah dasar. Dalam beberapa referensi hukum, asas adalah pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dengan sifat-sifat dalam peraturan yang konkrit.

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU No. 48 Tahun 2009”), kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Jadi, asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah dasar yang bersifat umum yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

1.2. Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia harus berpedoman pada asas-asas hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009. Asas-asas tersebut merupakan pedoman dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- Semua peradilan di seluruh wilayah Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Dalam menjalankan tugas dan fungsi, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang dan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
- Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.
- Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini tidak

menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

- Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- Dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa.
- Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak dipenuhinya ketentuan ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan.

- Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua MA perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Hak ingkar adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya.
- Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.
- Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.
- Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Dalam hal terjadi pelanggaran, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

2.1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, MKRI juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.

MKRI diatur lebih lanjut diatur di dalam UU No. 24 Tahun 2003, UU No. 8 Tahun 2011, UU No. 4 Tahun 2014, dan UU No. 7 Tahun 2020.

2.2. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 menentukan, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MAI) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,

dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Diperjelas lagi di dalam Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009, MARI merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan, yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, kecuali undang-undang menentukan lain.

MARI diatur lebih lanjut di dalam UU No. 14 Tahun 1985, UU No. 5 Tahun 2004, dan UU No. 3 Tahun 2009.

2.3. Badan-Badan Peradilan di Bawah MARI

Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan, peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan umum diatur lebih lanjut di dalam UU No. 2 Tahun 1986, UU No. 8 Tahun 2004, dan UU No. 49 Tahun 2009.

Pasal 25 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan, peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan agama diatur lebih lanjut di dalam UU No. 7 Tahun 1989, UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No. 50 Tahun 2009.

Pasal 25 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan, peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan militer diatur lebih lanjut di dalam UU No. 31 Tahun 1997.

Pasal 25 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 menentukan, peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan tata usaha negara diatur lebih lanjut di dalam UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun 2004, dan UU No. 51 Tahun 2009.

BAB III

SEJARAH PERADILAN AGAMA PADA MASA PENJAJAHAN DI INDONESIA

3.1. Teori tentang Eksistensi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia

Pertama, *theori receptie in complexu*. Menurut teori ini, Hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah undang-undang agama mereka, yaitu hukum Islam. Teori ini didukung oleh *Regeering Reglement (Staatsblad Tahun 1885 Nomor 2)*, khususnya pasal 75, 78, dan 109.

Kedua, *theori receptie*. Menurut teori ini, hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah hukum adat asli mereka, serta hukum Islam baru berlaku apabila menjadi bagian dari hukum adat dan keluar tidak sebagai hukum Islam tetapi sebagai hukum adat. Tokohnya adalah Cornelis van Vollen Hoven (1857-1933) dan Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Teori ini didukung oleh Pasal 134 ayat (2) IS (*Staatsblad 1929 No. 221*).

3.2. Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia sebelum Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Sebelum masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, eksistensi peradilan agama dapat dilihat dengan adanya *tahkim*, yaitu lembaga peradilan agama dalam bentuk yang sederhana, yang objeknya adalah hukum perkawinan dan kewarisan. Di samping itu, ada pula *ahl al-halli wal aqdi*, yaitu hakim yang diangkat oleh rapat marga menurut adat kebiasaan setempat. Ada pula *tauliyah*, yaitu hakim yang diangkat oleh para sultan dalam kekuasaan kerajaan Islam.

3.3. Peradilan Agama pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Peradilan Agama telah diyakini telah berproses di Indonesia sejak Islam memasuki bumi nusantara, diangkat sebagai lembaga peradilan negara oleh pemerintah kolonial Belanda melalui *Staatsblad* 1882 No. 152. Pengadilan Agama didirikan di Jawa dan Madura pada tanggal 01 Agustus 1882. Di Kalimantan Selatan (sebagian di Kalimantan Timur), lembaga ini didirikan pada tahun 1937 dengan nama Kerapatan Qadi. Kewenangan Peradilan Agama yang berlaku di Jawa dan Madura tugas pokoknya di bidang hukum perkawinan, sedangkan di luar wilayah itu mempunyai tugas pokok di bidang hukum perkawinan dan kewarisan.

3.4. Peradilan Agama pada Masa Pemerintahan Jepang

Pada zaman Jepang, posisi Pengadilan Agama tetap tidak berubah, kecuali terdapat perubahan nama menjadi *Sooryo Hooiin*. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 *Osanu Seizu* tanggal 07 Maret 1942 No. 1. Kemudian pada tanggal 29 April 1942, pemerintah bala tentara *Dai Nippon* mengeluarkan UU No. 14 Tahun 1942 yang berisi pembentukan *Gunsei Hoiin* (Pengadilan Pemerintah Bala Tentara) di tanah Jawa dan Madura. Dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1942 disebutkan, *Gunsei Hooiin* terdiri dari: *Tiho Hooiin* (Pengadilan Negeri), *Keizai Hooiin* (Hakim Polisi), *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten), *Gun Hooiin* (Pengadilan Kewedanan), *Kiaikoyo Kootoo Hooiin* (Mahkamah Islam Tinggi), dan *Sooryoo Hooiin* (Rapat Agama).

BAB IV

PERKEMBANGAN EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

4.1. Eksistensi Peradilan Agama Pada Masa Orde Lama

“Orde Lama” dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Belum genap setahun setelah merdeka, melalui penetapan PP No. 5 Tahun 1946, urusan Mahkamah Islam Tinggi dan Pengadilan Agama yang semula di bawah Departemen Kehakiman diserahkan kepada Departemen Agama.

Pada tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengatur pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Kalimantan Selatan melalui PP No. 45 Tahun 1957 yang berwenang mengenai masalah perkawinan dan kewarisan. Sesuai PP tersebut, Peradilan Agama berwenang memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami istri yang beragama Islam dan segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, rujuk, *fasakh*, nafkah, mas kawin, tempat kediaman, *mut'ah*, *hadhanah*, perkara waris, wakaf, hibah, *shadaqah*, *baitul mal*, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu.

4.2. Eksistensi Peradilan Agama pada Masa Orde Baru

“Orde Baru” adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya orde baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.

Sejak diundangkannya UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, eksistensi Peradilan Agama secara *de jure* sudah kuat, tetapi secara *de facto*

masih lemah. Salah satu bukti adalah masih diperlukannya pengukuhan oleh Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) bagi setiap eksekusi putusan Peradilan Agama.

Disparitas kompetensi dan predikat kuasa peradilan berakhir setelah diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Secara teknis peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan secara teknik pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Agama dilakukan oleh Menteri Agama.

4.3. Eksistensi Peradilan Agama pada Masa Reformasi

“Masa Reformasi” di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, B.J. Habibie. Periode ini dicirikan oleh lingkungan sosial-politik yang lebih terbuka.

Sejak UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama menjadi satu atap dengan peradilan yang lainnya. Artinya, secara teknis peradilan maupun pembinaan organisasi berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dalam undang-undang ini mulai dikenal adanya asas personalitas keislaman dan tidak ada lagi pilihan peradilan bagi perkara kewarisan.

Dengan diundangkannya UU No. 50 Tahun 2009 menjadi peletakan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan agama, pengawasan tertinggi, baik menyangkut teknis yudisial maupun non-yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Di sisi yang lain, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku

hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.

BAB V

KEDUDUKAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

5.1. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia

Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Berkaitan dengan pasal tersebut, ada 3 (tiga) frasa yang perlu untuk diberikan penjelasan.

Pertama, frasa “pelaku kekuasaan kehakiman”. Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dengan demikian, peradilan agama wajib menerima, memeriksa, dan mengadili perkara sesuai asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kedua, frasa “bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam”. Menurut penjelasan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. Khusus mengenai frasa “... yang beragama Islam ...”, penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan, yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan

sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini”.

Ketiga, frasa “mengenai perkara tertentu”. Berkaitan dengan kewenangan secara absolut peradilan agama, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menentukan, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kewenangan peradilan agama ini diperluas, mengingat perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 yang menyatakan, “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan” dinyatakan dihapus.

5.2. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Agama di Indonesia

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berdasarkan Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1989 dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Kemudian, dalam UU No. 3 Tahun 2006, disisipkan Pasal 3A yang menjelaskan, di lingkungan peradilan agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang.

5.3. Tempat Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia

Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 menentukan, “Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.” Namun, menurut penjelasan pasal tersebut, tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian. Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 menentukan, “Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.”

5.4. Pembinaan pada Peradilan Agama di Indonesia

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 3 Tahun 2006, pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh MARI, dengan ketentuan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Berbeda dengan sebelumnya, menurut Pasal 5 UU No. 7 Tahun 1989 terjadi dualisme pembinaan, untuk teknis peradilan dilakukan oleh MARI, sedangkan untuk organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Agama.

5.5. Tentang Kelas-Kelas Pengadilan Agama di Indonesia

Kelas-kelas pada pengadilan agama di Indonesia berdasar pada Peraturan MARI Nomor 5 Tahun 2018, tanggal 21 September 2018, *jo* Keputusan Ketua MARI Nomor 200/KMA/SK/X/2018, tanggal 9 Oktober 2018, *jo* Keputusan Ketua MARI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, tanggal 26 April 2019. Sesuai kebijakan-kebijakan tersebut, klasifikasi pengadilan agama terdiri atas “Kelas I A”, “Kelas I B”, dan “Kelas II”.

Sesuai Keputusan Ketua MARI Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, tanggal 26 April 2019, kriteria klasifikasi pengadilan di lingkungan peradilan agama ditetapkan berdasarkan: (a) unsur substantif (70%); dan (b) unsur penunjang (30%). Unsur substantif terdiri dari jumlah: (a) perkara cerai gugat; (b) persentase perkara cerai gugat; (c) perkara cerai talak; (d) persentase perkara cerai talak; (e) perkara lain; dan (f) persentase perkara lain. Sedangkan unsur penunjang terdiri dari: (a) penduduk; (b) kepadatan penduduk beragama Islam; (c) kemudahan akses ke pengadilan; (d) penerapan reformasi birokrasi; dan (e) letak pengadilan.

BAB VI

SUSUNAN BADAN

PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

Menurut Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan terdiri dari: (1) Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; (2) Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pasal 9 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 mengatur, susunan pengadilan agama terdiri dari Pinpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita.

6.1. Susunan Pimpinan Pengadilan Agama

Sesuai pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, pimpinan pengadilan agama terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Pasal 15 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, Pasal 13 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan agama, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 (tujuh) tahun sebagai hakim pengadilan agama.

6.2. Hakim pada Pengadilan Agama

Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan, hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Yang berhak mengangkat hakim menurut pasal 15 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 12B ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 menegaskan, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Selanjutnya pasal 13 ayat (1)

UU No. 50 Tahun 2009 mengatur lebih jelas, untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. Lulus pendidikan hakim;
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun; dan
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 15 ayat (1a) dan (1b) UU No. 50 Tahun 2009, hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MARI dan/atau KYRI melalui Ketua MARI. Dan usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh KYRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- c. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi

- ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
- d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya, Pasal 18 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Pasal 19 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17; dan/atau
- f. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2), (3), (4), (5), (6) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada: ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua MARI kepada Presiden; ayat (1) huruf b diajukan oleh MARI dan/atau KYRI; ayat (1) huruf c, d dan e diajukan oleh MARI; ayat (1) huruf f diajukan oleh KYRI. Sebelum MARI dan/atau KYRI mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5), hakim pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

6.3. Panitera pada Pengadilan Agama

Pasal 26 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan, pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang

dipimpin oleh seorang panitera. Pasal 26 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 mengatur, dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.

Pasal 27 UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- f. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan agama, atau menjabat wakil panitera pengadilan tinggi agama; dan
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

6.4. Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (PERMA RI No. 7 Tahun 2015), sudah tidak terdapat lagi jabatan wakil panitera. Menurut Pasal 97 *jo* Pasal 107 *jo* Pasal 117 Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, susunan organisasi kepaniteraan pengadilan agama terdiri atas: (a) Panitera Muda Permohonan; (b) Panitera Muda Gugatan; dan (c) Panitera Muda Hukum.

Pasal 31 UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. Berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama.

Pasal 33 UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

Pasal 36 UU No. 3 Tahun 2006 menentukan, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.

Pasal 38A UU No. 50 Tahun 2009 menentukan, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- d. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;
- e. Telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau
- f. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B UU No. 50 Tahun 2009 menentukan, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35; dan/atau
- f. Melanggar kode etik panitera.

6.5. Sekretaris pada Pengadilan Agama

Pasal 43 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan, pada setiap pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Selanjutnya, Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 45 UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Berijazah sarjana syari'ah, sarjana hukum Islam, sarjana hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana administrasi;
- f. Berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang administrasi peradilan; dan
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Berdasarkan PERMA RI No. 7 Tahun 2015, sudah tidak terdapat lagi jabatan wakil sekretaris. Menurut Pasal 311 *jo* Pasal 318 *jo* Pasal 325 PERMA RI No. 7 Tahun 2015, susunan

organisasi kesekretariatan pengadilan agama terdiri atas: (a) Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; (b) Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan (c) Subagian Umum dan Keuangan.

6.6. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Agama

Pasal 38 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan, pada setiap pengadilan ditetapkan adanya juru sita dan juru sita pengganti. Selanjutnya, Pasal 40 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 menentukan, juru sita pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MARI atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan. Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 menentukan, juru sita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 39 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi juru sita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Beragama Islam;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Berijazah pendidikan menengah;
- f. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai juru sita pengganti; dan
- g. Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

Pasal 39 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi juru sita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama.

BAB VII

SUSUNAN BADAN PERADILAN TINGGI AGAMA DI INDONESIA

Menurut Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan terdiri dari: (1) Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama; (2) Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding. Berdasarkan Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-Undang. Pasal 9 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 mengatur, susunan pengadilan tinggi agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

7.1. Susunan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama

Sesuai Pasal 10 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, pimpinan pengadilan tinggi agama terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua. Pasal 15 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MARI.

Pasal 14 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 3 (tiga) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang menjabat ketua pengadilan agama. Semetara itu, untuk wakil ketua, terdapat dalam Pasal 14 ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi wakil ketua pengadilan tinggi agama harus berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun sebagai hakim pengadilan tinggi agama atau 2 (dua) tahun bagi hakim pengadilan tinggi agama yang menjabat ketua pengadilan agama.

7.2. Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama

Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 menyebutkan, hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Yang berhak mengangkat hakim menurut Pasal 15 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 12B ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 menegaskan, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. Selanjutnya pasal 14 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan tinggi agama, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, dan huruf j;
- b. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
- c. Berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun sebagai ketua, wakil ketua, pengadilan agama, atau 15 (lima Belas) tahun sebagai hakim pengadilan agama;
- d. Lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung; dan
- e. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Menurut Pasal 15 ayat (1a) dan (1b) UU No. 50 Tahun 2009, hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MARI dan/atau KYRI melalui Ketua MARI. Dan usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh KYRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Pasal 18 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- b. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- c. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan agama, dan 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan tinggi agama; atau
- d. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden.

Pasal 19 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan/atau
- f. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2), (3), (4), (5), (6) UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada: ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua MARI kepada Presiden; ayat (1) huruf b diajukan oleh MARI dan/atau KYRI; ayat (1) huruf c, d dan e diajukan oleh MARI; ayat (1) huruf f diajukan oleh KYRI. Sebelum MARI dan/atau KYRI mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), dan (5), hakim pengadilan

mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

7.3. Panitera pada Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia

Pasal 26 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan, pada setiap pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera. Pasal 26 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 mengatur, dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 28 UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g;
- b. berijazah serendah-rendahnya sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam; dan
- c. berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai wakil panitera, 5 (lima) tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi agama, atau 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengadilan agama.

7.4. Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama

Berdasarkan PERMA RI No. 7 Tahun 2015, sudah tidak terdapat lagi jabatan wakil panitera. Menurut Pasal 89 PERMA RI No. 7 Tahun 2015, susunan organisasi kepaniteraan pengadilan tinggi agama terdiri atas: (a) Panitera Muda Banding; dan (b) Panitera Muda Hukum.

Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi panitera muda pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan

- b. Berpengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi agama, 3 (tiga) tahun sebagai panitera muda, 5 (lima) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan agama.

Pasal 34 UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi panitera pengganti pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf g; dan
- b. Berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai panitera pengganti pengadilan agama atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan tinggi agama.

Pasal 36 UU No. 3 Tahun 2006 menentukan, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung. Pasal 38A UU No. 50 Tahun 2009 menentukan, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan:

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. Sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus;
- d. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan agama;
- e. Telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi agama; dan/atau
- f. Ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 38B UU No. 50 Tahun 2009 menentukan, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan:

- a. Dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Melakukan perbuatan tercela;
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus menerus selama 3 (tiga) bulan;
- d. Melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35; dan/atau
- f. Melanggar kode etik panitera.

7.5. Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama

Pasal 43 UU No. 7 Tahun 1989 menyebutkan, pada setiap pengadilan ditetapkan adanya sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan dibantu oleh seorang wakil sekretaris. Selanjutnya, Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 46 UU No. 50 Tahun 2009 mengatur, untuk dapat diangkat menjadi sekretaris dan wakil sekretaris pengadilan tinggi agama, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g; dan
- b. Berpengalaman paling singkat 4 (empat) tahun di bidang administrasi peradilan.

Berdasarkan PERMA RI No. 7 Tahun 2015, sudah tidak terdapat lagi jabatan wakil sekretaris. Selanjutnya, menurut Pasal 297 PERMA RI No. 7 Tahun 2015, susunan organisasi kesekretariatan pengadilan tinggi agama terdiri atas: (a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan (b) Bagian Umum dan Keuangan.

BAB VIII

KEKUASAAN BADAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

8.1. Kekuasaan Relatif Peradilan Agama di Indonesia

Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan secara relatif pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Sementara itu, pasal 4 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Pembahasan mengenai “Kekuasaan secara Relatif” ini kemudian berkaitan dengan asas “*actor sequitur forum rei*” dalam hukum acara perdata maupun hukum acara peradilan agama di Indonesia. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg, serta Pasal 66 *jo* Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.

8.2. Kekuasaan Absolut Peradilan Agama di Indonesia

Kekuasaan secara absolut berkaitan dengan jenis perkara yang dapat diterima, diperiksa, dan diputus oleh suatu badan peradilan. Karena sifatnya absolut, maka antara satu badan peradilan dengan yang lainnya tidak dapat mempunyai kewenangan yang sama dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara.

Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah.

Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 mengatur, apabila terjadi sengketa hak milik yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Ketentuan demikian merupakan salah satu pelaksanaan atas adanya asas personalitas keislaman, selain kemudian soal “diakuinya” eksistensi peradiln agama di Indonesia. Selain itu, disisipkan juga Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 yang mengatur, pengadilan agama memberikan *itsbat* kesaksian *rukyyat al-hilal* dalam penentuan awal bulan pada tahun *hijriah*.

8.3. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil yang dimaksud adalah aturan-aturan hukum yang menjadi rujukan bagi hakim pada badan peradiln agama di Indonesia untuk memutus perkara-perkara sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 49 *jo* Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006. Sumber hukum materiil pada peradiln agama di Indonesia adalah hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hukum Islam bersumber dari al-Quran, hadis, *ijma* ulama, kitab-kitab fikih, serta penggunaan metode tertentu untuk menggali hukum Islam melalui *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *urf*, *maslahah mursalah*, dan lain sebagainya. Di samping itu, sumber selanjutnya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta peraturan pelaksanaannya, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat beserta peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi dan *landmark decision*, serta kebijakan-kebijakan internal MARI.

8.4. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil yang dimaksud adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil. Lazimnya disebut hukum acara. Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 mengatur, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tentang peradilan agama.

Sumber hukum formil peradilan agama adalah HIR, RBg, BW, UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi dan *landmark decision*, serta kebijakan-kebijakan internal MARI.

BAB IX

PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

9.1. Dasar Hukum Pengawasan Internal terhadap Peradilan Agama di Indonesia

Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 32 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2009 mengatur, pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan serta pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan pada semua badan peradilan yang berada di bawah MARI dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MARI. Pengawasan tersebut termasuk juga terhadap tingkah laku hakim sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 32A ayat (1) UU No. 3 Tahun 2009 *jo* Pasal 12A ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009.

Menurut Pasal 32 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2009, MARI berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Lebih lanjut, sesuai Pasal 32 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2009, MARI juga berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 *jo* pasal 12E ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, dalam melakukan pengawasan, MARI wajib: (a) menaati norma dan peraturan perundang-undangan; (b) berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim; dan (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

9.2. Pemaknaan atas Pengawasan Internal terhadap Badan Peradilan di Indonesia

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, pengawasan berasal dari kata “awas” yang berarti mengamati dan menjaga baik-baik. Secara harfiah, pengawasan mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh-sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya.

Secara normatif, monitoring bertujuan menjaga agar suatu usaha atau pekerjaan selalu dikerjakan dengan aturan (*rechmatig*) dan sesuai dengan peruntukannya (*doelmatig*). Di dalam perpektif terminologi internal MARI, pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan rencana dan berdasarkan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan dilakukan guna mewujudkan visi badan peradilan agama, yaitu “*Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung*”.

Pengawasan dan kewenangan yang dimiliki oleh MARI tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 32 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 *jo* Pasal 12E ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009. Hal ini dapat dimaknai bahwa sejauh dan sedalam apapun pengawasan internal yang dilakukan oleh MA, independensi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tidak boleh dikurangi.

9.3. Jenis-Jenis Pengawasan Internal

Ada 3 (tiga) jenis pengawasan. Pertama, pengawasan internal, yaitu pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan rutin.

Kedua, pengawasan melekat, yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif. Pengawasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan

efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga, pengawasan rutin, yaitu pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat pertama secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

9.4. Maksud, Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk: (a) memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan; (c) mencegah terjadinya penyimpangan, mal administrasi, dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan; dan (d) menilai kinerja.

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan MARI dan/atau pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang perlu dilakukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan, dan kinerja pelayanan publik pengadilan.

Fungsi pengawasan meliputi: (a) menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya; dan (c) menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan biaya berperkara yang murah.

Prinsip-prinsip yang harus ada dalam pengawasan adalah independensi, objektivitas, kompetensi, formalistik, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta efisien, efektif, dan ekonomis.

9.5. Ruang Lingkup Pengawasan Internal

Ruang lingkup pelayanan meliputi 5 (lima) area. Pertama, manajemen peradilan, meliputi: program kerja, pelaksanaan atau pencapaian target, pengawasan dan pembinaan, kendala dan hambatan, faktor-faktor yang mendukung, dan evaluasi kegiatan.

Kedua, administrasi perkara, meliputi: prosedur penerimaan perkara, prosedur penerimaan permohonan banding, prosedur penerimaan permohonan kasasi, prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali, keuangan perkara, pemberkasan perkara dan kearsipan, serta pelaporan.

Ketiga, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, meliputi: sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim, ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, minutasi perkara, dan pelaksanaan putusan (eksekusi).

Keempat, administrasi umum, meliputi: kepegawaian, keuangan, inventaris, perpustakaan, serta tertib persuratan dan perkantoran.

Kelima, kinerja pelayanan publik, meliputi: pengelolaan manajemen, mekanisme pengawasan, kepemimpinan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan atau perawatan inventaris, tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian, kecepatan dan ketepatan penanganan perkara, serta tingkat pengaduan masyarakat.

BAB X

PENGAWASAN EKSTERNAL TERHADAP PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

10.1. Dasar Hukum Pengawasan Eksternal terhadap Peradilan Agama di Indonesia

Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, KYRI bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Aturan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 18 Tahun 2011.

Dasar hukum terkait pengawasan eksternal terhadap badan peradilan agama di Indonesia, khususnya hakim, dapat dilihat pada pasal 12A ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009. Merujuk pada pasal 12C ayat (1) UU No. 50 tahun 2009, KYRI melakukan koordinasi dengan MARI dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, termasuk hakim pada badan peradilan agama.

Sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 19A dan Pasal 20A UU No. 18 Tahun 2011 *jo* Pasal 12E ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, dalam melakukan pengawasan, KYRI wajib: (a) menaati norma dan peraturan perundang-undangan; (b) menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim; dan (c) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh.

10.2. Pemaknaan atas Pengawasan Eksternal terhadap Badan Peradilan di Indonesia

Dalam perspektif MARI, pengertian pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh pejabat peradilan dapat berjalan sebagaimana mestinya

sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan terhadap aparat peradilan, apabila dipandang dari aspek lembaganya, dapat dibedakan menjadi pengawasan internal dan eksternal.

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh badan yang berada di luar lingkungan peradilan sendiri. Wewenang pengawasan eksternal yang diberikan oleh konstitusi kepada KYRI bertujuan untuk mewujudkan *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Pengawasan dan kewenangan yang dimiliki oleh KYRI tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 41 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 32 ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 *jo* Pasal 20A ayat (1) huruf d UU No. 18 Tahun 2011 *jo* Pasal 12E ayat (3) UU No. 50 Tahun 2009. Hal ini dapat dimaknai bahwa sejauh dan sedalam apapun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KYRI, independensi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tidak boleh dikurangi.

10.3. Pengawasan terhadap Perilaku Hakim

Berdasarkan Pasal 12D ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009, dalam melaksanakan pengawasan eksternal, KYRI mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Menurut Pasal 12D ayat (2) UU No. 50 Tahun 2009, dalam melaksanakan pengawasan, KYRI berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- b. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim;
- c. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan;
- d. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan MA dan badan-badan peradilan di bawah MA atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;

- e. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf d;
- f. Meminta keterangan atau data kepada MA dan/atau pengadilan;
- g. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan; dan/atau
- h. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

10.4. Tugas Komisi Yudisial Republik Indonesia

Sesuai Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011, KYRI mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara tertutup;
- d. Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim; dan
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Menurut Pasal 20 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011, selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KYRI juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) UU No. 18 Tahun 2011,

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KYRI dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim oleh hakim. Selanjutnya, sesuai Pasal 20 ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011, aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan KYRI.

10.5. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Menurut Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2011, ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim:

- a. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, KYRI menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim;
- b. Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KYRI dapat meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan/atau hakim;
- c. Pimpinan badan peradilan dan/atau hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh KYRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan KYRI diterima;
- d. Apabila badan peradilan dan/atau hakim belum memberikan keterangan atau data dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KYRI meminta keterangan dan/atau data tersebut melalui pimpinan MAI;
- e. Pimpinan MAI meminta kepada badan peradilan dan/atau hakim untuk memberikan keterangan atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan KYRI;

- f. Apabila permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, pimpinan badan peradilan atau hakim yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan KYRI.

10.6. Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

KYRI dapat melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim berdasarkan Pasal 22A UU No. 18 Tahun 2011. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2011, KYRI:

- a. Melakukan verifikasi terhadap laporan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran;
- c. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan;
- d. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi; dan
- e. Menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Selanjutnya, Pasal 20 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2011, dalam hal saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, KYRI dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.7. Pemeriksaan dan Hasil Pemeriksaan

Menurut Pasal 22B ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011, pemeriksaan oleh KYRI meliputi: (a) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan (b) Permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang

diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Selanjutnya, Pasal 22B ayat (2) dan (3) UU No. 18 Tahun 2011, dalam setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim secara patut oleh KYRI.

Menurut Pasal 22B UU No. 18 Tahun 2011, hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 22A ayat (1) huruf e menyatakan: (a) dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti; atau (b) dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.

10.8. Sanksi terhadap Hakim yang Melakukan Pelanggaran

Menurut Pasal 22D UU No. 18 Tahun 2011, dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 22C huruf a, KYRI mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MARI. MARI menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh KYRI dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Sanksi ringan terdiri atas: (1) teguran lisan; (2) teguran tertulis; atau (3) pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas: (1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; (2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun; (3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun; atau (4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. Sanksi berat terdiri atas: (1) pembebasan dari jabatan struktural; (2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun; (3) pemberhentian

sementara; (4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau (5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Sesuai Pasal 22G UU No. 18 Tahun 2011, dalam hal dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf b, Majelis Kehormatan Hakim menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti dan memulihkan nama baik hakim yang diadukan.

10.9. Sanksi Berat Berupa Pemberhentian Tetap

Sesuai Pasal 22F UU No. 18 Tahun 2011, sanksi berat berupa pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4 dan angka 5 diusulkan KYRI kepada Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) orang anggota KYRI dan 3 (tiga) orang hakim agung.

Majelis Kehormatan Hakim memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang diusulkan oleh KYRI atau MARI dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak. MARI wajib melaksanakan keputusan Majelis Kehormatan Hakim dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diucapkan keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

10.10. Pendapat mengenai Sanksi

Menurut Pasal 22E ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011, dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara KYRI dan MARI mengenai usulan KYRI tentang penjatuhan sanksi dan MARI belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22D ayat (3) maka usulan KYRI berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh MARI.

Menurut Pasal 22E ayat (2) dan (3) UU No. 18 Tahun 2011, dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara KYRI dan MARI mengenai usulan KYRI tentang penjatuhan sanksi ringan,

sanksi sedang, dan sanksi berat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (2) huruf c angka 4 dan angka 5, maka dilakukan pemeriksaan bersama antara KYRI dan MARI terhadap hakim yang bersangkutan. MARI dan KYRI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan KYRI sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh MARI.

Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bersama oleh KYRI dan MARI, sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (4) UU No. 18 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Ali, M. Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Arief, Eddi Rudiana (et.all). *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Rosdakarya, 1991.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Yogyakarta: Gema Insani Press, 1996.
- . *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional: Bertenun dengan Benang-Benang Kusut*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- . *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2013.
- Halim, Abdul. *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Latief, M. Djamil. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Manan, Abdul dan Ahmad Kamil. *Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.
- Na'mah, Ulin. "Polemik Penyatutan Peradilan Agama di Bawah Mahkamah Agung". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 52, No. 1 (2018): 31-53.
- Noeh, Zaini Ahmad dan Basit Adnan. *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.
- Rachmatulloh, Mochammad Agus. "Mediasi dan Lembaga Peradilan". *Opini Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, (2021): 11-16.
- Rizal, Moch Choirul. "Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam". *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 4, No. 1 (2020): 65-83.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wahidin, Syamsul dan Abdurrahman. *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1994.

TENTANG PENYUSUN

Mochammad Agus Rachmatulloh, lahir di Jombang, 4 Agustus 1984. Penyusun adalah Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Untuk keperluan korespondensi, penyusun dapat dihubungi melalui *e-mail*: magusr@iainkediri.ac.id.

Moch Choirul Rizal, lahir di Kota Surabaya, 17 Oktober 1990. Penyusun adalah Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Untuk keperluan korespondensi, penyusun dapat dihubungi melalui *e-mail*: rizal@iainkediri.ac.id. Informasi lainnya mengenai karya-karya penyusun, silakan mengunjungi *blog*: www.mochchoirulrizal.com.

Diktat ini kami maksudkan untuk menambah referensi bagi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang mengambil mata kuliah “Peradilan Agama di Indonesia”. Penyusunan diktat ini kami selaraskan dengan rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah yang dimaksud.

Diktat ini kami susun berdasarkan pada berbagai referensi terkait eksistensi peradilan agama di Indonesia. Untuk mempermudah pembacaan, diktat ini tersusun atas 10 (sepuluh) bab: (1) Bab I: Asas-Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia; (2) Bab II: Pelaku Kekuasaan di Indonesia; (3) Bab III: Sejarah Peradilan Agama pada Masa Penjajahan di Indonesia; (4) Bab IV: Perkembangan Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia; (5) Bab V: Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia; (6) Bab VI: Susunan Badan Peradilan Agama di Indonesia; (7) Bab VII: Susunan Badan Peradilan Tinggi Agama di Indonesia; (8) Bab VIII: Kekuasaan Badan Peradilan Agama di Indonesia; (9) Bab IX: Pengawasan Internal terhadap Peradilan Agama di Indonesia; dan (10) Bab X: Pengawasan Eksternal terhadap Peradilan Agama di Indonesia.